

**PENGARUH SIKAP, KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI PETANI
TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA TANI**

(Studi Kasus Petani KUT di KUD Subur
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



Disusun Oleh :

Aryo Santiko

D4E000095

Kepada

Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro
2003

**LEMBAR PENGESAHAN
TESIS**

**PENGARUH SIKAP, KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI
PETANI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM
KREDIT USAHA TANI
(Studi Kasus Petani KUT di KUD Subur Gunungpati Kota
Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**ARYO SANTIKO
D4E000095**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Juni 2003

Susunan Tim Penguji

Anggota Tim Penguji lain :


Dr. ARI PRADANAWATI, MS
Pembimbing I

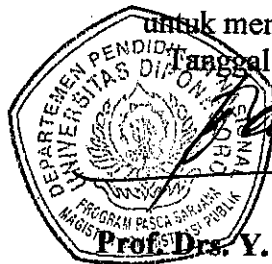

Drs. WAHYU PUJOYONO, SU


Drs. ARI SUBOWO, MA
Pembimbing II


Dra. SURYANINGSIH, MSI

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal : 14 JUNI 2003



Prof. Drs. Y. WARELLA, MPA., PhD.
Ketua Program Studi MAP

UPT-PUSTAK-UND.P

No. Daft: 2932/T/MAP/C1

: 15/11/05

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2003


ARYO SANTIKO

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF FARMERS' ATTITUDE, COMMUNICATION AND PARTICIPATION TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF KREDIT USAHA TANI PROGRAM (Case Study KUT Farmers in KUD Subur Gunungpati Subdistric Semarang City)

This research has four variables namely attitude variable (X1), Communication variable (X2), participation variable (X3) as independent variables whereas implementation variable (Y) is independent variable. Research method used is quantitative research method elaborates the influence of independent variables toward dependent variable with Non Parametric data analysis, Rank Kendall Correlation analysis technique and Concordation Kendall coefficient by meant of SPSS program. Sample in this research is 80 respondents from the population of 784.

The quantity of the influence of farmers' attitude to the implementation of KUT program is 35.5 %. The quantity of the influence of farmers' communication to the implementation of KUT program is 18.49 %. The quantity of the influence of farmers' participation to the implementation of KUT program is 8,24 %. The quantity of the influence of farmers' attitude, communication and participation to the implementation of KUT program is 84,27 %. The existence of the correlation between independent variables towards dependent variable is strengthened by crossed tables between the variables which show the positive correlation.

Oter factors which determine the implementation KUT program outside of the research variables is 15,37 %, enable by management factor of KUT, the organizational characteristic of organizer, culture of bureaucracy, the officers' capability, the certainly of normative base, etcetera.

ABSTRAKSI
PENGARUH SIKAP, KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI PETANI
TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA TANI
(Studi Kasus Petani KUT di KUD Subur Kecamatan Gunungpati
Kota Semarang)

Dalam penelitian ini mempunyai empat variabel yaitu variabel sikap (x1), variabel komunikasi (x2), variabel partisipasi (x3) sebagai variabel independen sedangkan variabel implementasi (Y) sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang menguraikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan analisis data non parametrik, teknik analisa korelasi rank kendall dan koefisien konkordasi kendall dengan alat bantu program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 responden dari jumlah populasi sebanyak 784.

Besarnya pengaruh sikap petani terhadap implementasi program KUT sebanyak 35,5 %. Besarnya pengaruh komunikasi terhadap implementasi program KUT sebanyak 18,49 %. Besarnya pengaruh partisipasi petani terhadap implementasi program KUT sebesar 8,24 %. Besarnya pengaruh sikap, komunikasi dan partisipasi petani terhadap implementasi program KUT sebesar 84,27 %. Adanya hubungan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen diperkuat oleh tabel silang antara variabel tersebut yang menunjukkan hubungan yang positif.

Faktor-faktor lain yang menentukan implementasi program KUT di luar variabel penelitian adalah sebesar 15,73 dimungkinkan oleh faktor manajemen KUT, Karakteristik organisasi penyelenggara KUT, budaya birokrasi, kapabilitas aparat, kepastian landasan normatif dan sebagainya.

Semarang, Juni 2003
Dosen Pembimbing I

Dr. Ari Pradanawati, MS

KUPERSEMBAHKAN BUAT

Orang tuaku tercinta pengukir jiwaku,

Bapak H. Herman Sukirno, BSc, Ibu Hj. Supriyatin, BA

Yang terkasih, Sayidah Annahra

Yang aku kagumi, Para Petani Penerima KUT

Genta bukanlah genta tanpa dibunyikan

Lagu bukanlah lagu tanpa dilantunkan

Cinta bukanlah cinta tanpa dipersembahkan

Teori bukanlah teori tanpa diimplementasikan

Ilmu bukanlah ilmu tanpa diamalkan

INTISARI

PENGARUH SIKAP, KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI PETANI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA TANI (Studi Kasus Petani KUT di KUD Subur Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)

Sebagian besar rakyat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan petani diantaranya dengan bantuan modal KUT (Kredit Usaha Tani). Dalam proses implementasi KUT banyak masalah yang timbul diantaranya keterlambatan penyaluran, ketepatan jumlah kredit, ketepatan sasaran, ketepatan manfaat maupun ketepatan pengembaliannya. Sehingga perlu diadakan pengkajian terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi KUT tersebut.

Penulis menilai diantara variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi KUT adalah sikap, komunikasi dan partisipasi petani. Sikap petani yang cenderung hanya menerima saja mempunyai interpretasi bahwa KUT hanyalah program top down dari pemerintah dengan berbagai aturan yang kaku. Komunikasi yang dilakukan cenderung dilakukan hanya satu arah saja yaitu komunikasi vertikal dari aparat KUT kepada petani serta sosialisasi program yang kurang merata. Partisipasi petani kurang diperhatikan terlihat petani jarang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan program KUT.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh sikap, komunikasi dan partisipasi terhadap implementasi program KUT. Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan diperkaya oleh metode kualitatif. Adapun variabel yang digunakan adalah variabel sikap (X1), Komunikasi (X2), Partisipasi (X2) sebagai variabel independen sedangkan variabel implementasi (Y) sebagai variabel dependen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan pedoman pengukuran skor dari 1 hingga 4. Jumlah populasi sebanyak 784 diambil 80 responden sebagai sampel dengan teknik random sampling. Teknik analisa statistik dengan teknik statistik non parametrik dengan pengukuran uji hipotesis dengan korelasi rank kendall dan koefisien konkordasi kendall dengan menggunakan alat bantu program SPSS (Statistical Product and Service Solution).

Berdasarkan penghitungan statistik, Besarnya pengaruh sikap petani terhadap implementasi program KUT sebanyak 35,5 %. Besarnya pengaruh komunikasi terhadap implementasi program KUT sebanyak 18,49 %. Besarnya pengaruh partisipasi petani terhadap implementasi program KUT sebesar 8,24 %. Besarnya pengaruh sikap, komunikasi dan partisipasi petani terhadap implementasi program KUT sebesar 84,27 %. Adanya hubungan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang diperkuat oleh tabel silang antara variabel tersebut menunjukkan hubungan yang positif.

Agar implementasi program KUT di Kecamatan Gunungpati bisa lebih berhasil maka harus diadakan perbaikan dalam berbagai faktor terkait yaitu :

- Prosedural kredit mulai dari pola pengajuan, penyaluran dan pengembalian kredit diusahakan lebih dirasionalisasi dan dirampingkan.
- Jangka waktu pembayaran kredit hendaknya lebih diperpanjang.
- Perlu adanya landasan normatif (kepastian hukum) dalam penyelesaian permasalahan KUT.
- Perlu adanya penanganan pasca panen dari institusi formal
- Perlu adanya forum evaluasi keberhasilan implementasi program KUT yang melibatkan berbagai komponen terutama petani, NGO, penyelenggara KUT serta kalangan akademis.
- Perlu digalinya variabel lain diluar variabel penelitian yang dimungkinkan bisa mempengaruhi implementasi program KUT diantaranya faktor manajemen KUT, karakteristik organisasi, budaya birokrasi, kapabilitas aparat, kepastian landasan normatif.

Semarang, Juni 2003
Dosen Pembimbing I

Dr. Ari Pradanawati, MS

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan keberkahan-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis yang berjudul "Pengaruh Sikap, Komunikasi dan Partisipasi Petani terhadap Implementai Program Kredit Usaha Tani (Studi Kasus Petani KUT di KUD Subur Kecamatan Gunungpati Kota Semarang) dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian studi Pasca Sarjana pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi dengan konsentrasi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro semarang.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Ari Pradanawati, MS dan Bapak Drs. Ari Subowo, MA selaku Dosen Pembimbing Tesis, serta Bapak Drs. Wahyu Pujoyono, SU dan Dra. Suryaningsih, Msi selaku Tim Penguji tesis.
2. Ketua KUD subur Kecamatan Gunungpati Kota Semarang beserta para petani penerima KUT yang telah banyak menyediakan data-data yang sangat lengkap demi kelancaran pembuatan tesis.
3. Bapak H. Herman Sukirno, BSc selaku Ketua Dekopinwil Propinsi Jawa Tengah yang telah banyak membantu kelengkapan data-data penunjang mengenai perkoperasian
4. Teman-teman seperjuangan dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi dan bantuannya sampai selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan dalam penulisan tesis ini sangat diharapkan dan semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Semarang, 14 Juni 2003

Penulis

ARYO SANTIKO
NIM D4E000095

DAFTAR ISI

INTISARI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II : TUNJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Landasan Teori.....	15
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	28
C. Hipotesis.....	29
BAB III : METODE PENELITIAN.....	31
A. Rancangan Penelitian.....	31
B. Ruang Lingkup penelitian.....	31

C. Lokasi Penelitian	32
D. Variabel Penelitian.....	32
E. Jenis dan Sumber Data	37
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	38
H. Teknik Pengumpulan Data.....	38
I. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL	
PENELITIAN.....	44
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	44
B. HASIL PENELITIAN.....	47
B.1. Identitas Responeden.....	47
C. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	50
C.1. Uji Normalitas	50
C.2. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	50
C.3. Hubungan sikap petani dengan implementasi program KUT	51
C.4. Hubungan Komunikasi dengan implementasi program KUT	54
C.5. Hubungan partisipasi petani terhadap impelementasi program KUT	56
C.6. Hubungan sikap, komunikasi dan partisipasi terhadap impelementasi.....	58
D. DISKUSI.....	62

BAB V	: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	64
A.	KESIMPULAN.....	64
B.	REKOMENDASI.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar II.1 : Diagram Geometri Hipotesis	30
2. Gambar IV.1 : Struktur Organisasi KUD Subur	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel IV.1 : Responden Menurut Umur	49
2. Tabel IV.2 : Responden Menurut Pendidikan	50
3. Tabel IV.3 : Hubungan Sikap dengan Implementasi	52
4. Tabel IV.4 : Tabel Silang Pengaruh Sikap dengan Implementasi	53
5. Tabel IV.5 : Hubungan Komunikasi dengan Implementasi	55
6. Tabel IV.6 : Tabel Silang Pengaruh Komunikasi dengan Implementasi	56
7. Tabel IV.7 : Hubungan partisipasi dengan Implementasi	57
8. Tabel IV.8 : Tabel silang Pengaruh Partisipasi dengan Implementasi	58
9. Tabel IV.9 : Tabel silang Pengaruh sikap, Komunikasi dan Partisipasi terhadap Implementasi	60
10. Tabel IV.10 : Hubungan Sikap, Komunikasi dan Partisipasi terhadap Implementasi	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Tabel Variabel dan Kuesioner
2. Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan
3. Lampiran 3 : Data Induk Responden
4. Lampiran 4 : N Par Test
5. Lampiran 5 : Uji Validitas
6. Lampiran 6 : Uji Reliabilitas
7. Lampiran 7 : Hasil Penelitian
8. Lampiran 8 : Kriteria Penilaian Tiap Variabel
9. Lampiran 9 : Interval Penilaian variabel
10. Lampiran 10 : Hubungan Sikap dengan Implementasi
11. Lampiran 11 : Hubungan Komunikasi dengan Implementasi
12. Lampiran 12 : Hubungan Partisipasi dengan Implementasi
13. Lampiran 13 : Kendall's W Test
14. Lampiran 14 : Sikap, Implementasi Crosstabulation
15. Lampiran 15 : Komunikasi, Implementasi Crosstabulation
16. Lampiran 16 : Partisipasi, Implementasi crosstabulation
17. Lampiran 17 : Lampiran-lampiran persyaratan KUT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai suatu organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai, seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang direncanakan dan terarah, bersungguh-sungguh dan berhasil guna.

Pelaksanaan pembangunan selain meningkatkan pendapatan nasional se harusnya menjamin pembagian pendapatan yang merata dalam rangka mewujudkan azas adil dan merata. Pembangunan tidak hanya ditujukan pada faktor produksi melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dengan menumbuhkan azas hidup sederhana dan wajar, bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur tetapi juga adil.

Untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata harus mengacu pada amanat konstitusi agar tidak menyimpang dari cita-cita dan tujuan nasional. Amanat konstitusi telah memberikan landasan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Hal ini merupakan pilar-pilar demokrasi ekonomi yang mendasari mekanisme perekonomian dan pembangunan nasional.

Sebagian besar rakyat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan, Oleh karena itu perlu adanya upaya pemberdayaan petani. Salah satu upaya pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pemberian program KUT (Kredit Usaha Tani). Namun demikian program pemberdayaan lewat KUT ini tidaklah mudah. Dalam proses implementasinya banyak kendala yang harus diatasi terutama masalah ketepatan penyaluran, ketepatan jumlah kredit, ketepatan sasaran, ketepatan manfaat maupun ketepatan pengembaliannya.

Berdasarkan Skim Kredit Program untuk Depkop dan PKM, Dirjen Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam tertanggal Oktober 1998 mengenai penjelesaian penjelesan kredit program untuk KUT menjelaskan bahwa penerima kredit : petani/kelompok tanimelalui koperasi / KUD atau LSM (KUD dapat berttindak sebagai pelaksana atau penyalur kredit). Sektor Usaha : untuk memenuhi kebutuhan modal kerja petani, dalam rangka membiayai usaha tani intensifikasi padi/palawija dan hortikultura yaitu pisang, nenas, pepaya, markisa, jeruk, salak, cabe merah, bawang merah, kentang dan jahe. Suku bunga ; besarnya kredit didasarkan pada kebutuhan nyata dari petani dalam rangka intensifikasi yang besarnya ditentukan setiap tahun oleh menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pengendalian Bimas. Suku bunga : 10,5 %, pertahun (bunga tersebut sudah termasuk fee untuk KUD sebesar 5 %, PPL 1 %, Bank 2 %, Perum PKK 1,5 %, titipan pemerintah 1 %). Jangka waktu : kredit harus dikembalikan dalam waktu 1 tahun. Jaminan : kelayakan usaha. Bank pelaksana : Bank Umum. Dasar Ketentuan : SK Bank Indonesia No. 31/24.A/KEP/DIR, tanggal 7 Mei 1998 dan SE No. 31/7/UK tanggal 2 Juli 1998.

Pada periode TP 1999, petunjuk pelaksanaan KUT diperbaharui atas dasar Keputusan bersama Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendalian Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 1081/KPTS/BM.530/10/1999 dan 20/SKB/M/X/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan KUT.

Adapun prosedur permohonan, pencairan, penyaluran, pengembalian dan pengendalian KUT dijelaskan sebagai berikut :

A. Prosedur Permohonan KUT

1. Petani/kelompok tani menyusun perencanaan usaha dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK)
2. Petani dalam wadah kelompok tani mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang ditandatangani oleh seluruh petani dan ketua kelompok tani yang dilampiri dengan surat kuasa garapan dan pemilik lahan (contoh formulir terlampir) atau surat keterangan dari Kepala Desa (contoh formulir terlampir) apabila diantara anggota kelompok tani ada yang menggarap lahan milik orang lain. Formulir RDKK disediakan koperasi/LSM dengan contoh formulir yang disederhanakan (terlampir).
3. Bagi kelompok tani yang telah menyelesaikan penyusunan RDKK sebelum petunjuk ini diterima dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk ini tetap dapat diproses lebih lanjut tanpa harus menyesuaikan dengan RDKK yang disederhanakan.

4. RDKK yang telah disusun dan ditandatangani para petani dan ketua kelompok tani diajukan kepada PPL (petugas penuluh lapangan) untuk disetujui kebenarannya.
5. RDKK yang telah disetujui PPL oleh kelompok tani diajukan kepada koperasi/LSM 1 (satu) bulan sebelum awal musim tanam.
6. Koperasi/LSM menyusun rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diterima dari kelompok tani yang telah mendapat pengesahan atas kebenaran RDKK dari PPL. Formulir rekapitulasi RDKK disediakan oleh masing-masing koperasi/LSM dengan bentuk formulir seperti pada lampiran
7. Rekapitulasi diajukan oleh koperasi / LSM kepada Kepala kantor Departemen/Dinas Koperasi PK&M. Atas pengajuan rekapitulasi RDKK dari koperasi/LSM, Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dapat memberikan persetujuan/penolakan kredit.
8. Persetujuan / penolakan Kepala Kantor Departemen /Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah tingkah Kabupaten/kota atas rekapitulasi RDKK diberikan setelah permohonan KUT koperasi/LSM diteliti kesesuaiannya dengan program intensifikasi setempat oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/kota atau yang ditugaskan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten /Kota.
9. Koperasi / LSM mengajukan permohonan KUT kepada Bank dengan dilampiri :
 - a. Rekapitulasi RDKK yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen /Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
 - b. Berkas RDKK dan Dokumen pendukung lainnya.

10. Dokumen permohonan KUT hanya ditandatangani oleh Kepala Desa/lurah (surat kuasa garapan), ketua kelompok tani (RDKK), PPL dan Kepala kantor Departemen / dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (Rekapitulasi RDKK)

B. Prosedur Pencairan KUT

1. Setelah menerima berkas permohonan KUT yang telah disetujui Kakandepkop, PKM dari koperasi/LSM, Bank pelaksana mempersiapkan administrasi pencairannya.
2. Atas dasar persetujuan kredit yang diberikan Kepala Kandepkop PKM, bank mencairkan kredit setelah pengurus koperasi /LSM menandatangani perjanjian KUT yang tercantum dalam RDKK
3. Penarikan kredit dilakukan oleh koperasi atau LSM sesuai dengan rencana penarikan KUT yang tercantum dalam RDKK.
4. Proses permohonan KUT sejak pengajuan oleh kelompok tani kepada koperasi atau LSM sampai dengan penandatanganan perjanjian peminjaman KUT di bank dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan langkah-langkah persiapan sedini mungkin agar waktu proses pengajuan kredit tersebut tidak terganggu.
5. Rincian proses seperti pada butir 4 (empat) sebagai berikut :
 - a. Proses penelitian oleh PPL atas kebenaran RDKK, seperti nama petani, luas areal dan kebutuhan kredit paling lambat 7 hari.
 - b. Proses seleksi dan rekapitulasi RDKK oleh pengurus koperasi atau LSM paling lambat 7 hari kerja.

- c. Proses pemeriksaan dan persetujuan Rekapitulasi RDKK oleh Kepala Kantor Departemen/Dinas koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah paling lambat 5 hari kerja.
- d. Proses penyelesaian administrasi sampai dengan pencairan kredit di bank paling lambat 2 hari.

6. Bank pelaksana mencairkan dana KUT kepada koperasi/LSM

C. Prosedur Penyaluran KUT

1. Koperasi/LSM mengatur jadwal pertemuan dengan ketua kelompok tani dan petani untuk menyalurkan dana KUT yang telah dicairkan dari Bank pelaksana.
2. Koperasi/LSM melakukan konfirmasi ulang terhadap data-data yang tercantum dalam RDKK guna mengantisipasi adanya perubahan data petani karena yang pindah alamat dan sebagainya.
3. Koperasi/LSM menyerahkan dana KUT dalam jumlah yang utuh sesuai RDKK melalui kelompok tani atau langsung kepada petani. Untuk itu setiap petani/kelompok tani menandatangani surat pernyataan penerima dana KUT dan sekaligus kesanggupan membayar lunas sesuai dengan perjanjian. Pelaksabnaan penyakluran dana KUT dari koperasi/LSM kepada petani dilakukan secara transparan dan disangsikan oleh PPL, PKL, tenaga pendamping dan Satuan penggerak Bimas Kecamatan. Contoh formulir penerimaan KreditUsaha Tani terlampiran.
4. Petani dapat menerima kredit dari koperasi /LSM dalam bentuk natura (saprodi) dalam rangka penerapan mutu intensifikasi. Pemberian dalam

bentuk natura dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani dengan koperasi/LSM dan sebaliknya jika diberikan dalam bentuk tunai diperlukan pengawasan oleh tenaga pendamping dan PPL agar dananya benar-benar digunakan untuk membeli saprodi.

5. Dana KUT yang tidak tersalurkan oleh koperasi/LSM kepada petani/kelompok tani segera dikembalikan kepada Bank pelaksana.

D. Prosedur Pengembalian Dana KUT

1. Petani dapat mengangsur KUT pada setiap waktu terutama pada saat panen atau sesuai jadwal pengembalian dalam RDKK dan harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo.
2. Pembayaran angsuran KUT dapat dilakukan secara tunai atau natura. Pembayaran secara natura dilakukan dengan menyepakati bersama (koperasi/LSM dan petani) terlebih dahulu harga natura yang diserahkan petani kepada koperasi / LSM maupun besarnya dana yang akan dipotong sebagai angsuran pengembalian KUT.
3. Dalam setiap membayar angsuran pengembalian KUT baik secara langsung kepada koperasi / LSM maupun melalui kelompok tani, petani harus menerima bukti setoran.
4. Kelompok tani yang menerima dana angsuran pengembalian KUT dari petani segera menyetorkannya kepada koperasi/LSM dan untuk itu kelompok tani menerima bukti penerimaan setoran dari koperasi/LSM.
5. Koperasi/LSM menerima bukti penerimaan setoran dari Bank pelaksana

E. Pengendalian KUT

Pengendalian kredit pada semua tingkatan mulai dari tingkatan petani, kelompok tani, PPL, koperasi/LSM dilaksanakan dengan pola supervisi dimulai sejak kegiatan perencanaan, pengajuan permohonan, pencairan, penyaluran, penggunaan sampai pengembalian KUT dengan cara sebagai berikut :

1. Pengendalian di tingkat perencanaan dilakukan oleh Satuan Pelaksana Bimas berdasarkan penetapan areal intensifikasi yang memerlukan KUT, komoditas yang dibiayai KUT, petani/kelompok tani.
2. Pengendalian di tingkat permohonan KUT dilakukan pada saat penyusunan RDKK oleh PPL dan tenaga pendamping, persetujuan RDKK oleh PPL dan persetujuan rekapitulasi RDKK oleh Kakandepkop PKM. Untuk pengamanannya setiap lembar RDKK agar ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan PPL. Demikian pula pada setiap lembar rekapitulasi RDKK agar ditandatangani oleh pengurus koperasi/LSM dan Kakandepkop PKM.
3. Pengendalian pencairan KUT dilakukan pada saat penyaluran dana KUT dari koperasi/LSM kepada petani / kelompok tani yang dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh PPL, PKL, tenaga pendamping, Satgrak Bimas Kecamatan.
4. Pengendalian penggunaan dana KUT dilakukan melalui uji petik baik oleh PPL, koperasi/LSM, Satuan penggerak Bimas Kecamatan, PKL maupun Kandep/Dinkop PKM.

5. Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian di atas diperlukan dukungan pelaksanaan tertib administrasi mulai dari perencanaan, permohonan, pencairan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian pada setiap lini terkait, yaitu petani, kelompok tani, koperasi/LSM, PPL, Kakandepkop dan Bank pelaksana.

Adapun prosedur penyaluran KUT sebagai berikut : Kelompok tani mengajukan permohonan KUT dalam bentuk RDKK (Rencabna definitif Kebutuhan Kelompok) kepada koperasi atau LSM setelah disetujui dan diperiksa oleh PPL dengan memperhatikan kebutuhan indikatif KUT. Koperasi menyampaikan permohonan KUT kepada Bank pelaksana setempat setelah mendapat persetujuan dari Kantor Koperasi dan PKM dalam bentuk rekapitulasi RDKK masing-masing kelompok tani. Kankop dan PKM menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggungjawab penyelenggaraan KUT di wilayahnya kepada Bank pelaksana disertai rincian plafon KUT per koperasi/LSM yang direkomendasikan. Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen dan menyampaikan persetujuan penyediaan KUT. Selanjutnya pihak koperasi/ LSM menandatangani perjanjian pinjaman KUT dengan Bank pelaksana, yang kemudian disalurkan kepada masing-masing kelompok tani yang direkomendasikan.

Dalam penetapan plafon kredit dan rencana lahan KUT direalisasikan melalui TP (Tahun Penyediaan). Tahun Penyediaan terdiri dari dua musim tanam (MT). Setiap MT mempunyai waktu pengembalian kredit dalam jangka waktu selama satu tahun. Contoh TP 1998/1999 terdiri dari MT 1998/1999 yang

berlangsung dari 1 Oktober 1998 sampai 30 Maret 1999 dan MT 1999 yang berlangsung dari 1 April 1999 sampai 30 September 1999. Sehingga jatuh tempo pembayaran MT 1998/1999 adalah 30 September 1999 sedangkan jatuh tempo MT 1999 adalah 31 Maret 2000.

Salah satu bukti bahwa implementasi program KUT perlu dikaji ulang adalah diantaranya dengan banyaknya tunggakan KUT. Di Kota Semarang terdapat tunggakan pada MT 1998/1999 sebanyak Rp 13.368.106.000,00 dari realisasi kredit sebesar Rp 22.780.845.000,00. Pada MT 1999/2000 terdapat tunggakan sebanyak Rp 328.080.000,00 dari realisasi kredit sebesar Rp 977.767.000,00 (sumber : Kankop-PKM Kota Semarang).

Sedangkan keadaan KUT pada data 31 Mei 2000 di Kecamatan Gunungpati terdapat tunggakan pada MT 1999/I sebesar Rp 127.994.799,00 dari realisasi kredit Rp 321.121.850 dengan jumlah petani 406 orang, luas areal 281,95 Ha. Pada MT 1999/II terdapat tunggakan sebanyak Rp 172.128.750,00 dari realisasi kredit sebesar Rp 384.006.600,00 (sumber : KUD Subur Gunungpati). KUT yang disalurkan melalui KUD Gunungpati kesemuanya khusus jenis tanaman padi.

Selain adanya problematika tunggakan di atas masih terdapat permasalahan lain diantaranya seringnya keterlambatan penyaluran KUT, mekanisme kredit, pola KUT yang tidak sesuai dengan siklus petani dan sebagainya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka jelaslah bahwa implementasi Program KUT menghadapi permasalahan yang rumit sehingga perlu digali

beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi tersebut. Variabel-variabel yang mempengaruhi bisa terkait pada program KUT itu sendiri maupun penerima program KUT (petani).

Penulis menilai diantara variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi KUT yang berkaitan dengan penerima program (petani) adalah sikap petani, komunikasi dan partisipasi petani.

Sikap petani yang mempunyai interpretasi bahwa KUT hanyalah sebagai program top down dari pemerintah dengan berbagai aturan yang kaku sehingga sulit dalam proses pengurusannya dan seringnya keterlambatan penyaluran menyebabkan petani mempunyai interpretasi bahwa kredit memang diperlukan tetapi KUT tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sesungguhnya petani, hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman petani terhadap KUT. Komunikasi yang dilakukan hanyalah satu arah saja yaitu dari aparat KUT kepada petani dengan sistem intruksional komando dari aparat sehingga terkadang kurang menyerap aspirasi dari petani, hal ini diperparah dengan tingkat sosialisasi program yang masih sangat kurang. Sedangkan partisipasi petani tidak tulus lahir dari hati sanubari petani untuk meminjam KUT dikarenakan interpretasi petani yang kurang baik terhadap sistem pengelolaan KUT, peran serta petani bersifat pasif dan menerima belaka karena KUT benar-benar suatu program top down, hal ini diperparah dengan tingkat pendidikan petani yang masih rendah.

Dengan dasar itulah penulis memilih variabel-variabel yang mempengaruhi adalah sikap petani, partisipasi dan komunikasi sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi Program KUT.

Berdasarkan alasan-alasan di atas pula maka penulis mengambil judul “Pengaruh Sikap, Komunikasi dan Partisipasi petani terhadap Implementasi Program KUT (Studi Kasus Petani KUT Padi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)”.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Permasalahan Program KUT di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sikap Petani terhadap KUT mempunyai interpretasi yang kurang positif karena sistem pengelolaan KUT yang kurang baik dan tidak disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan petani, misalnya pola MT yang belum tentu pas waktu tanam petani.
2. Kegiatan komunikasi kurang berjalan dengan baik misalnya pertemuan untuk membahas permasalahan KUT antara petani dan aparat KUT (PPL, KUD, Kankop, Bank) jarang dilaksanakan dan pola komunikasinya hanya satu arah yaitu bersifat komando dari aparat saja.
3. Partisipasi petani kurang berjalan dengan baik karena petani kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai KUT.
4. Masih kurangnya pemahaman petani KUT terhadap informasi KUT (jukiak-juknis KUT), manfaat dari KUT dan sosialisasi informasi yang masih lemah dalam pengelolaan KUT.

Sehingga permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh sikap petani terhadap keberhasilan implementasi program KUT di KUD Subur Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
2. Apakah ada pengaruh komunikasi terhadap implementasi program KUT di KUD Subur Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
3. Apakah ada pengaruh partisipasi petani terhadap implementasi program KUT di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
4. Apakah ada pengaruh sikap, komunikasi dan partisipasi petani terhadap implementasi program KUT di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui besarnya pengaruh sikap petani terhadap keberhasilan implementasi program KUT
2. Mengetahui besarnya pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program KUT
3. Mengetahui besarnya pengaruh partisipasi terhadap keberhasilan implementasi program KUT
4. Mengetahui besarnya pengaruh sikap, komunikasi dan partisipasi terhadap keberhasilan implementasi program KUT.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan dan kendala program KUT yang sebenarnya

2. Bagi masyarakat, sebagai acuan untuk membentuk kesadaran kritis mengenai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan KUT.
3. Bagi ilmu pengetahuan, bisa memberikan wacana dan memperkaya khasanah ilmu-ilmu administrasi publik khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
4. Bagi pemerintah, sebagai masukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan KUT.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

A.1. Implementasi Program KUT

Mempelajari implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatier pada hakikatnya adalah : berusaha untuk memahami apa yang terjadi sesudah suatu kebijakan diformulasikan dan mendapat pengesahan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijakan mengadministrasikannya untuk memberikan dampak tertentu dari program atau kebijakan tersebut kepada masyarakat (dalam Suwitri, 1993:2-3). Program KUT merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan petani hendaknya mencerminkan kepentingan petani yang disesuaikan dengan sikon petani dan karakteristik lahan pertanian yang harus bisa dirasakan manfaatnya oleh petani, dengan memakai pola yang sesuai dengan kebutuhan petani.

Mengimplementasikan kebijakan publik menurut Charles O.Jones (Islamy, 1992:62) adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya. Pendapat ini didukung oleh William N. Dunn yang mengemukakan bahwa diartikan bahwa implementasi diartikan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan (Dunn, 1998 :132).

Implementasi sebagai usaha untuk mencapai tujuan juga dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab (1990:123) berikut ini : fungsi implementasi adalah untuk membentuk hubungan yang memungkinkan tujuan ataupun sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai out time (hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah).

Diharapkan KUT bisa menjadi modal kerja bagi petani dalam mengelola lahan pertaniannya sehingga bisa mewujudkan hasil akhir program swasembada pangan dan meningkatkan taraf hidup petani. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya hubungan yang baik antara petani, aparat KUT dan pemerintah dalam pelaksanaan KUT.

Dalam penelitian ini mengkaji apa yang terjadi pada saat pelaksanaan KUT, pola pengelolaan, manfaat serta dampak programnya terutama berkaitan dengan variabel sikap, komunikasi dan partisipasi petani terhadap implementasi KUT.

George Edward III mendefinisikan implementasi kebijaksanaan sebagai :
“Variasi tindakan yang luas yaitu membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, menyelenggarakan pendanaan, menjabarkan informasi, menganalisa permasalahan, menolong, membantu para personal mengumpulkan dan merencanakan reorganisasi dan lain-lain “ (dalam Purnaweni, 1980:2).

Mengenai keberhasilan implementasi suatu kebijakan, Edward mengemukakan bahwa :

“Jika sebuah kebijaksanaan tidak tepat dalam arti tidak dapat memecahkan masalah untuk mana kebijaksanaan tersebut telah dirancang maka hal itu merupakan suatu kegagalan, tidak peduli seberapa baik kebijaksanaan itu telah dilaksanakan. namun sebaliknya suatu kebijaksanaan yang cemerlang dilaksanakan dengan buruk akan gagal mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan” (dalam Purnaweni, 1980:1). Dalam penelitian ini mengkaji sejauhmana keberhasilan implementasi program KUT dan indikator-indikator

yang mempengaruhi implemetasi serta sejauhmana implementasi KUT sesuai dengan tujuannya memberdayakan petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini juga menelaah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pengajuan, penyaluran dan pengembalian KUT serta penanganan pasca panen.

Menurut Grindle (dalam Purnaweni, 1980 :8-10) mengemukakan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi aktivitas penerapan kebijakan yaitu kontent dan konteks dari kebijakan.

Kontent kebijakan berisi :

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi
2. Jenis manfaat yang dapat diperoleh
3. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan
4. Kedudukan pengambilan keputusan
5. Pelaksana-pelaksana program
6. Sumber-sumber yang tersedia

Konteks kebijakan berisi :

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi dari mereka yang terlibat dalam penerapan kebijakan.
2. Karakteristik rezim dan lembaga
3. Kesadaran dan ketanggapan

Kontent dalam penelitian ini meliputi : pihak petani merupakan pihak yang kepentingannya dipengaruhi, manfaat yang diperoleh petani dari KUT, jangkauan perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak pasca menerima KUT, keterlibatan

petani dalam *decision making process* KUT, aparat KUT (PPL, KUD, Kankop, Bank, dan lain-lain) sebagai pelaksana KUT. Sedangkan konteks dalam penelitian ini adalah karakteristik penyelenggara KUT (KUD, Kankop, PPL, Bank), kepekaan penyelenggara KUT terhadap permasalahan KUT, serta kepentingan dan strategi pelaksanaannya.

Menurut Korten "bahwa daya kerja suatu program pembangunan adalah fungsi dari kesesuaian antara kelompok sasaran, program dan organisasi pelaksana. Dengan istilah yang lebih khusus program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan pihak penerima program dengan hasil program. Persyaratan program dengan kemampuan khusus dari organisasi pembantu dan sarana pengungkapan kebutuhan pihak penerima program dan proses pengambilan keputusan dari organisasi" (Korten dan Syahrir, 1988:240-242).

Dalam penelitian ini, program yang dimaksud adalah program KUT dengan berbagai sistem pengelolaannya, penerima KUT adalah petani, sedangkan organisasi penyelenggara adalah koperasi, Kankop, PPL dan Bank atau lebih khusus lagi adalah KUD. Implementasi KUT bisa berjalan dengan baik manakala ada kesesuaian antara program KUT itu sendiri, petani sebagai penerima program dan KUD sebagai organisasi penyelenggara KUT. Implementasi KUT bisa berhasil manakala ada kesinambungan dan kesesuaian antara ketiganya. Penelitian ini menelaah faktor penerima program (petani) terutama diteliti melalui variabel sikap, komunikasi dan partisipasi petani serta menelaah implementasi terutama diteliti proses pelaksanaan, pengajuan, penyaluran, pengembalian KUT, manfaat serta dampak program tersebut.

Menurut Edward III keberhasilan menurutnya dipengaruhi oleh empat variabel penting yaitu komunikasi, sikap, struktur birokrasi dan sumber-sumber daya (dalam Purnaweni, 1980 :10).

Ruang lingkup public policy yang pertama yakni membangkitkan adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memikirkan cara-cara yang baik untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat rakyat banyak, maka public policy kurang bermakna (Toha, 1983 :7).

Uraian di atas menunjukkan bahwa implementasi program KUT dipengaruhi oleh banyak variabel diantaranya adalah sikap, komunikasi dan partisipasi.

A.2. Sikap

Gerungan (1996:149) menjelaskan tentang sikap sebagai berikut:

Sikap (Attitude) dapat diterjemahkan sebagai sikap terhadap obyek tertentu yang berupa sikap pandangan atau sikap perasaan. Sikap ini disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap obyek tersebut.

Sikap petani terhadap KUT tergantung dari pola pikir, pandangan dan perasaan petani terhadap program KUT yang meliputi proses pengajuan, penyaluran serta manfaat kredit yang dirasakan. Sebenarnya pola pikir petani dalam memandang KUT cukup simpel yaitu kredit bisa disalurkan ke petani dengan mudah, cepat, tepat, sesuai kebutuhan dan bermanfaat serta aparat yang simpatik.

Mar'at mengemukakan bahwa sikap adalah kesiapan atau kesediaan untuk bertindak (dalam Effendi, 1983:121).

Berkowitz mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap obyek adalah perasaan mendukung atau memihak ataupun perasaan tidak mendukung terhadap obyek tersebut (dalam Azawar, 1988:3).

Sikap petani yang menerima KUT sebagai kredit program merupakan kesiapan atau kesediaan petani untuk bertindak sesuai dengan aturan main KUT. Namun demikian pola KUT yang kaku, terlalu birokratis dan seringnya keterlambatan dalam penyaluran menyebabkan bersikap kurang simpatik kepada KUT.

Menurut Edward bahwa sikap merupakan faktor penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesan (dalam Purnaweni, 1991:30). Dalam melaksanakan KUT hendaknya penyelenggara KUT memperhatikan pandangan petani terhadap pola yang dijalankan selama ini. Pola yang dijalankan selama ini apakah sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan petani atau belum.

Allport berpendapat bahwa terdapat tiga komponen dalam sikap yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif atau kecenderungan berperilaku. Komponen kognitif berkaitan dengan kepercayaan tentang suatu obyek, komponen afektif berhubungan dengan perasaan emosional dan kecenderungan bertindak laku mengacu pada kesiapan untuk bertindak.

Penjelasan lebih lanjut tentang komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan tingkah laku (komponen konatif) dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen kognitif adalah komponen yang terdiri dari persepsi, kepercayaan dan stereotif yang dimiliki individu tentang sesuatu (Azwar,1988:18).
 2. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap obyek sikap dan perasaan yang menyangkut masalah emosional seseorang terhadap suatu obyek (Azwar,1988:120).
 3. Komponen konatif meliputi bentuk perilaku yang tidak hanya dapat dilihat secara langsung, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang (Azwar,1988:20).
- Selain faktor-faktor diatas, terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan sikap, diantaranya adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang berpengaruh, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama serta faktor emosi dalam diri individu (Azwar,1988:24).

Menurut uraian di atas, sikap petani terhadap KUT bisa berupa pandangan atau perasaan yang bisa ditampakan melalui tindakan atau perilaku petani terhadap pelaksanaan KUT bisa berupa menerima, menolak, puas, tidak puas, terpaksa, sukarela terhadap sistem pengelolaan KUT ataupun bahkan pernyataan perilaku misal berupa sikap marah terhadap pola KUT.

A.2. Komunikasi

Menurut Webster bahwa komunikasi merupakan suatu penyampaian atau proses pemberitahuan dan penerimaan suatu keterangan, tanda atau kabar lewat pembicaraan, gerakan, tulisan dan lain-lain (Toha, 1983 :108).

Menurut Davis bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dan memberikan pengertian kepada orang lain (Kerlinger, 1987:180). Proses penyampaian informasi KUT hendaknya disosialisasikan secara meluas kepada seluruh petani dengan menggunakan berbagai sarana-sarana yang menunjang. Proses sosialisasi informasi KUT hendaknya juga bisa dijalankan secara berjenjang mulai dari Kankop, koperasi, PPL, kelompok tani hingga para petani.

Menurut The Liang Gie bahwa komunikasi adalah penyampaian warta yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain, sekaligus mencakup keyakinan secara cermat gagasan-gagasan dari seseorang ke dalam pikiran orang lain, sehingga tercapai pengertian yang ditentukan atau menimbulkan tindakan-tindakan yang diharapkan (The Liang Gie, 1984:590). Penyampaian informasi yang banyak mengenai KUT harus dilakukan secara cermat dan akurat sehingga bisa meminimalisir kekeliruan informasi ataupun salah persepsi informasi. Pemberian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan KUT kepada seluruh kelompok tani bisa memperjelas informasi mengenai KUT.

Adam Indrawijaya (1988:53) mengemukakan bahwa ada beberapa unsur dalam komunikasi yaitu :

1. Sumber informasi
2. Penerima pesan
3. Pesan
4. Media
5. Hasil

Proses komunikasi menurut Sastropetro (1987:7) adalah jalan atau urutan kegiatan sehingga terjadi atau timbul pengertian tentang suatu hal diantara unsur-unsur yang saling berkomunikasi. Idrawijaya (1988:53) mengemukakan ada beberapa unsur dalam komunikasi, yaitu :

1. Source (sumber komunikasi)
2. Communican (penerima pesan)
3. Communicate (pesan)
4. Chanel (saluran/media)
5. Effect (hasil).

Sumber informasi KUT adalah petugas atau aparat KUT (Kankop, koperasi, PPL, Bank pelaksana), penerima pesan adalah para petani penerima KUT, pesan adalah segala informasi mengenai KUT; media bisa berupa selebaran, pengumuman, juklak ; hasil merupakan dampak dari informasi tersebut bisa berupa pengertian dan pemahaman dalam menerima informasi. Unsur-unsur tersebut sangat penting artinya bagi petani dalam memahami KUT secara komprehensif sehingga mengerti tugas, hak dan kewajiban sebagai penerima KUT.

Dari Edward III mengemukakan bahwa perintah kebijakan harus jelas, bila tidak pelaksanaan kebijakan akan menjadi bingung terhadap apa yang harus mereka lakukan. Sehingga mereka akan membuat pengertian sendiri yang mungkin berbeda dengan membingungkan dan membuat prustasi para staf administrasi dan menghambat penerapan secara efektif (dalam Purnaweni, 1991:4).

Dalam hubungannya dengan implementasi kebijakan, Edward III mengemukakan 3 indikator komunikasi kebijakan yang efektif, yaitu :

1. Tranmisi, yaitu bahwa sebelum seseorang dapat menerapkan kebijakan, ia harus benar-benar memahami dan menyetujui keputusan-keputusan yang harus dijelankannya.
2. Kejelasan (clarity), yaitu bahwa kebijakan harus diterima dengan jelas oleh para pelaksana kebijakan.
3. Konsisten, yaitu perintah-perintah kebijakan tidak boleh kontradiktif karena akan mempersulit para pelaksana kebijakan (dalam Purnaweni, 1991:4-13).

Dalam melaksanakan program KUT, penyelenggara KUT (Kankop, koperasi, Bank pelaksana) hendaknya bisa menjalankan KUT seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan, juklak dan juknis KUT. Penyelenggara KUT hendaknya juga sudah mempertimbangkan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan dalam pelaksanaan KUT terutama penyaluran dan pengembalian kredit.

Menurut uraian di atas, komunikasi yang berhubungan dengan KUT merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari aparat KUT kepada petani sehingga petani bisa memahami sejelas-jelasnya apa sebenarnya KUT. Komunikasi mengenai KUT yang baik mampu membuahkan hasil berupa umpan balik dari petani berupa kejelasan sistem pengelolaan KUT. Proses komunikasi diharapkan bersifat dua arah antara petani kepada aparat ataupun aparat KUT kepada petani petani.

A.4. Partisipasi

Hoofsteede merupuskan pengertian partisipasi secara sederhana sebagai berikut : *“The taking in one more prases of process (partisipasi adalah ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses)”*.

Davis mengemukakan partisipasi adalah keterlibatan mental atau emosional yang mendorong seseorang untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggungjawab terhadapnya (Sasropetro, 1988:18).

Menurut Mubyarto pengertian partisipasi sebagai berikut :

“Kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang ranpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Ndraha, 1987:102).

Adapun bentuk dan jenis partisipasi sebagaimana dikemukakan oleh Davis sebagai berikut :

1. bentuk partisipasi meliputi :

- Konsultasi
- Sumbangan spontan berupa baang
- Sumbangan dari luar yang berbentuk proyek bersifat berdikari
- Sumbangan dalam bentuk jasa kerja
- Proyek yang dibiayai oleh komuniti setelah ada konsensus dalam rapat komuniti.
- Aksi masal mengerjakan proyek secara sukarela

- Mengadakan perjanjian bersama untuk bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan/cita-cita.
- Melakukan pembangunan secara endogen dlama lingkup keluarga
- Pembangunan proyek-proyek komuniti yang otonom

2. Jenis partisipasi antara lain :

- Partisipasi dalam pikiran
- Partisipasi dalam tenaga
- Partisipasi dalam pikiran dan tenaga
- Partisipasi dengan keahlian
- Partisipasi dengan barang
- Partisipasi dengan uang
- Partisipasi dengan jasa-jasa

(Bryan dan White, 1989:268).

Menurut Winardi (1981:64) mengemukakan bahwa turut sertanya seseorang baik secara mental maupun secara emosional untuk memberikan sumbangsih-sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawabnya untuk melaksanakan hal tersebut.

John M. Cohen dan Norman Uphoff membedakan partisipasi sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
4. Partisipasi dalam penilaian (Syamsi, 1988:143).

Menurut uraian di atas, Partisipasi petani sebenarnya tidak hanya sebatas partisipan pasif penerima program KUT tetapi lebih dari itu sebenarnya petani bisa turut dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai KUT sehingga KUT bisa sesuai dengan karakteristik lahan pertanian maupun sikon dari petani. Partisipasi petani bisa diwujudkan dalam bentuk kesediaan peran sertanya baik berupa materiil maupun immateriil serta menjalankan berbagai kewajibannya.

A.5. Hubungan antara variabel komunikasi dengan keberhasilan implementasi program KUT

Menurut Edward III (dalam Purnaweni, 1991:30), komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Hal ini bisa dilihat suatu program yang dikomunikasikan secara timbal balik akan membuat kedua belah pihak yaitu aparat KUT maupun petani KUT memahami peran dan tugas masing-masing dalam pelaksanaan program KUT. Dengan adanya komunikasi yang baik maka informasi dari aparat maupun aspirasi dari petani akan berjalan secara selaras dan harmonis sehingga program bisa dijalankan dengan baik.

A.6. Hubungan antara variabel sikap dengan keberhasilan implementasi program KUT

Menurut Edward (dalam Purnaweni, 1991:30), sikap juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Hal ini bisa dilihat dengan adanya sikap birokrat / aparat yang baik dalam melayani KUT

maka akan dibalas dengan sikap petani KUT yang baik juga. Sikap petani bisa diperlihatkan melalui interpretasi terhadap KUT, sikap mendukung atau tidak terhadap KUT, sikap tertarik atau tidak terhadap KUT dan sebagainya. Jika petani sudah menunjukkan sikap yang baik dengan interpretasi positif terhadap KUT maka pelaksanaan program KUT bisa berjalan dengan baik.

A.7. Hubungan partisipasi dengan keberhasilan implementasi program KUT

Menurut Toha (1983:7), kedudukan partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Hal ini bisa dilihat bahwa petani KUT sebagai sasaran dari program KUT harus memiliki peran serta dalam menjalankan program KUT, tanpa peran serta petani maka KUT hanyalah sebuah program tanpa pelaksanaan. Partisipasi petani bisa ditunjukkan dengan kemauannya dalam menjalankan KUT. Keterlibatan petani dalam perencanaan pengelolaan KUT dapat menumbuhkan peranserta petani dalam mensukseskan pelaksanaan KUT.

B. Pembahasan Penelitian yang Relevan

Dalam bab ini penulis akan mengutarakan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana peneluan-penemuan tersebut akan memberikan gambaran apakah hasil penelitian akan mendukung kegiatan penelitian berikutnya. Penelitian yang dilakukan oleh saya pada tahun 1998-2000 dengan judul "Keberhasilan Implementasi Program KUT (Studi komparatif di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Banyumanik)" menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi KUT di daerah tersebut dan perlu diadakan kajian yang sama dengan berbagai sudut pandang.

Hasil penelitian menyebutkan adanya perbedaan tingkat keberhasilan di kedua kecamatan. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan dalam implementasi program KUT diantaranya sistem atau pola masa tanam KUT itu sendiri yang menyebabkan berbagai macam keterlambatan penyaluran yang disertai dengan ketidakmampuan pengelola KUT dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini juga ditemukan fenomena pola top down KUT menyebabkan partisipasi petani tidak berdasarkan atas kebutuhannya petani dan karakteristik lahan. Komunikasi yang berjalan hanya satu arah saja yaitu petugas KUT kepada petani. Sedangkan persepsi pengelola KUT hanyalah untuk menjalankan tugas saja sehingga sikap aparat cenderung memaksakan dan menyeragamkan program tanpa melihat jenis kebutuhan petani yang beraneka ragam. Sehingga penelitian yang dilakukan sekarang semakin dalam untuk lebih membuktikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KUT terutama variabel sikap, komunikasi, dan partisipasi.

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel sikap terhadap keberhasilan implementasi program KUT.
2. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program KUT
3. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel partisipasi terhadap keberhasilan implementasi program KUT
4. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel sikap, komunikasi dan partisipasi terhadap keberhasilan implementasi program KUT.

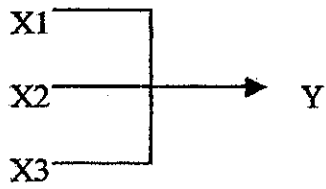
Diagram geometri hipotesis

1. $X1 \longrightarrow Y$

2. $X2 \longrightarrow Y$

3. $X3 \longrightarrow Y$

4.



Gambar II.1. Diagram Geometri Hipotesis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah memakai metode penelitian kuantitatif dengan diperkaya oleh metode kualitatif.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini masih dalam koridor ilmu administrasi publik dengan fokus penelitian kebijakan publik dalam tataran implementasi program KUT, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sikap, komunikasi dan partisipasi. Meski demikian tidak menutup kemungkinan akan muncul fenomena-fenomena ataupun permasalahan selain dari variabel-variabel diatas yang masih relevan dengan penelitian ini. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah petani penerima KUT sehingga ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih dalam kerangka ilmu administrasi publik
2. Menguraikan permasalahan-permasalahan dalam implementasi program KUT dan upaya menemukan alternatif problem solving permasalahan tersebut.
3. Penelitian ini menguraikan bagaimana pengaruh variabel sikap, komunikasi dan partisipasi petani terhadap implementasi program KUT.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUD Subur Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

D. Variabel Penelitian

D.1. Klasifikasi Variabel

Adapun klasifikasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel sikap sebagai variabel independen I (X1)
2. Variabel komunikasi sebagai variabel independen II (X2)
3. Variabel partisipasi sebagai variabel independen III (X3)
4. Variabel keberhasilan implementasi program sebagai variabel dependen (Y)

D.2. Definisi Konseptual

Berdasarkan dari kerangka teori di atas maka dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Sikap adalah perpaduan dari komponen kognitif yaitu tanggapan masyarakat sasaran tentang suatu program, yang diikuti oleh penilaian secara afektif berupa rasa tertarik atau tidak tertarik yang diikuti oleh kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku.
2. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi tentang suatu program dari aparat/penyuluh secara konsisten sehingga masyarakat mampu memahami secara jelas informasi yang disampaikan tersebut

3. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara mental dan emosional serta fisik untuk menyumbangkan buah pikiran, tenaga maupun material guna mencapai tujuan pelaksanaan program KUT.
4. Keberhasilan implementasi program adalah suatu keadaan tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan dan telah menjadi kesepakatan bersama dari orang-orang atau organisasi yang terlibat dalam suatu aturan atau usaha bersama atas penggunaan secara cermat sumber-sumber yang tersedia.

D.3. Definisi Operasional

Sesuai dengan konsep yang telah diajukan maka definisi konsep di atas dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Sikap bisa diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Komponen kognitif yaitu tanggapan, persepsi dan kepercayaan anggota kelompok terhadap program KUT dengan item-item sebagai berikut :
 - tingkat kepercayaan petani terhadap sistem pengelolaan sistem KUT
 - tingkat kepercayaan petani terhadap aparat KUT
 - persepsi dan tingkat kepercayaan petani terhadap penyaluran dan pelaksanaan KUT
 - tingkat kepercayaan petani terhadap jumlah, plafon dan realisasi kredit.
 - b. Komponen afektif yaitu tanggapan emosional anggota kelompok terhadap program (senang/tidak senang) dengan item-item sebagai berikut :

- Kondisi psikis petani dalam menerima KUT dan sistem pengelolaan secara senang atau tidak senang.
 - Tingkat ketertarikan petani terhadap KUT
- c. Komponen konatif yaitu kecendrungan seorang untuk bertindak yang meliputi bentuk perilaku yang dapat dilihat secara langsung ataupun berupa perkataan dengan item-item sebagai berikut :
- Perilaku petani terhadap KUT yang ditunjukkan dengan mendukung atau tidak mendukung
 - Perilaku petani dalam menerima atau menolak sistem penyaluran KUT
 - Perilaku petani dalam melunasi kredit atau sesuai atau tidak sesuai aturan

Perilaku petani dalam bentuk ketidakpuasan dengan perkataan terhadap pelaksanaan KUT.

2. Variabel komunikasi diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :
- a. Tingkat pemahaman dan persetujuan anggota kelompok terhadap program KUT dengan item-item sebagai berikut :
 - Tingkat pemahaman dan persetujuan petani tentang program KUT
 - Tingkat persetujuan petani terhadap sistem pengelolaan petani terhadap sistem pengelolaan KUT
 - Tingkat persetujuan petani terhadap jumlah kredit.
 - b. Tingkat kejelasan petani KUT dalam menerima informasi program KUT dengan item-item sebagai berikut :

- Tingkat kejelasan materi informasi yang diterima petani
 - Tingkat sosialisasi dan publikasi KUT oleh aparat
 - Sarana yang digunakan dalam sosialisasi dan publikasi
- c. Tingkat konsistensi penyampaian informasi oleh para aparat yaitu apakah informasi yang diperoleh dari aparat yang berbeda selalu sesuai menurut anggota kelompok dengan item-item sebagai berikut :
- Kesamaan dan tingkat konsistensi penyampaian informasi antar aparat.
 - Tingkat kebenaran informasi dengan isi peraturan yang sesungguhnya

3. Variabel partisipasi dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Peran serta dalam perencanaan program dengan item-item sebagai berikut:
- Tingkat kehadiran dalam pertemuan
 - Tingkat aktivitas petani dalam pertemuan
 - Tingkat keikutsertaan petani dalam pertemuan
- b. Peran serta dalam pelaksanaan program dengan item-item sebagai berikut:
- Tingkat penggunaan dana
 - Tingkat kesediaan dalam pengembalian kredit
 - Tingkat kemampuan petani dalam mengelola kredit
 - Tingkat kerelaan petani dalam membayar iuran kelompok

c. Peran serta dalam pengawasan program dengan item-item sebagai berikut:

- Sikap petani (kelompok tani) dalam menilai hasil program
- Tingkat kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.
- Peran serta dalam penilaian program

4. Variabel implementasi Program KUT diukur melalui indikator sebagai berikut :

a. Pengelolaan program KUT dengan item-item sebagai berikut :

- Tingkat kelengkapan informasi
- Tingkat ketetapan prosedural KUT
- Pengawasan penyaluran KUT
- Mentalitas dan kejujuran pengelola KUT

b. Kepatuhan kelompok tani/petani pengambilan KUT dengan item-item sebagai berikut :

- Ketaatan atas aturan KUT
- Ketaatan untuk menjalankan petunjuk petugas KUT
- Ketaatan anggota terhadap kelompok tani
- Kesadaran terhadap tugas dan tanggungjawab penerima KUT
- Jumlah tunggakan kredit

c. Dampak Program KUT dengan item-item sebagai berikut :

- Kenaikan produktivitas pengambil KUT
- Kenaikan tingkat kesejahteraan pengambil KUT menurut jumlah penghasilan.
- Tingkat pencapaian tujuan KUT.
- Kondisi psikis petani KUT

d. Pengembangan usaha setelah menerima KUT dengan item-item sebagai berikut :

- Peningkatan laba produksi pertanian
- Jangkauan pemasaran hasil pertanian
- Peningkatan jumlah tenaga kerja
- Peningkatan waktu kerja
- Peningkatan kelengkapan sarana dan perlengkapan bertani

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang dipergunakan berasal dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah petani penerima KUT
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang menjelaskan implementasi KUT yang telah dilaksanakan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang contoh: monografi kecamatan, laporan KUT permusim tanam, dokumentasi KUT, rekapitulasi KUT se Kota Semarang, juklak juknis KUT serta lisan aparat KUT.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner sebagai instrumen penelitian utama dengan menggunakan pertanyaan terstruktur baik terbuka maupun tertutup, Pertanyaan terstruktur dan tertutup yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi implemntasi KUT dan variabel-varieblnya

sehingga mempunyai nilai akan diskor, sedangkan pertanyaan terbuka tidak diskor dan hanya memperjelas informasi yang diperoleh sehingga menjadikan data lebih akurat.

Pedoman untuk pengukuran adalah jika terdapat jawaban dengan bobot rendah maka diberikan skore 1 dan seterusnya sehingga jawaban yang berbobot tinggi diberi skor maksimal 4.

G. Populasi dan Teknik Sampel

“Berapa besarnya sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang representatif, beberapa peneliti menyatakan bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10 % dan ada pula yang menyatakan besarnya sampel minimum 5 % dari jumlah satuan-satuan elementer dari populasi (Singarimbun, 1981 : 106).

Populasi dalam penelitian ini adalah para petani penerima KUT MT 1999 periode I dan MT 1999 periode II di KUD Subur Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebanyak 784 orang. Sampel dalam penelitian ini 10 % dari jumlah populasi sebanyak 78,4 responden dibulatkan menjadi 80 responden, dengan menggunakan teknik *random sampling*.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap tokoh-tokoh petani, para ketua kelompok tani dan aparat KUT di Kecamatan Gunungpati dengan cara *snowball* dan *triangulasi*.

- b. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki mengenai implementasi KUT.
- c. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu diberikan kepada responden mengenai implementasi KUT yang telah dijalankan di Kecamatan Gunungpati. Disini responden tinggal mengisi daftar pertanyaan sesuai petunjuk pengisian.
- d. Dokumentasi, yaitu usaha pengumpulan data dengan membaca buku-buku, dokumen-dokumen, laporan, brosur, monografi, surat kabar atau hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan KUT terutama implementasi KUT di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

L. Teknik Analisa Data

Dalam menguji hipotesis penelitian, penulis akan menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS (Statistical Product and service Solution). Selanjutnya untuk teknik analisa digunakan teknik statistik Nonparametrik kerana penulis berasumsi skala ordinal, dan karena skala pengukuran ordinal yang akan digunakan untuk korelasi tunggal dengan Korelasi Rank Kendall sedangkan korelasi ganda dengan Koefisien Konkordasi Kendall.

Analisa data dengan menggunakan :

- a. Analisa data kuantitatif merupakan teknik analisa data yang dilakukan dengan penghitungan dengan menggunakan angka-angka. Adapun pengolahan datanya mencakup editing, dan tabulasi.

Editing, yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan melalui kegiatan memeriksa dan meneliti daftar pertanyaan untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan atau ketidaklengkapan, maka harus dilakukan pembentukan dan perlengkapan data yang keliru atau tidak lengkap.

Coding, yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan melalui kegiatan mengkategorikan data secara sistematis dengan cara memberikan kode, simbol atau skor menurut kriteria yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, setiap kategori dalam kuesioner yang mempunyai nilai akan diskor pada setiap optionnya. Nilai maksimal yang mendukung keberhasilan implementasi KUT diberi nilai 4 sedangkan nilai minimum adalah 4.

Tabulasi, yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan melalui kegiatan memindahkan data dari daftar pertanyaan ke dalam tabel-tabel yang telah disiapkan.

- b. Analisa data kualitatif merupakan teknik analisa data yang dilakukan dengan cara melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis berdasarkan distribusi data.

Kedua analisis pada dasarnya dalam praktek proses penelitian tidak dapat dipisahkan karena dalam penelitian tidak semua data dapat dijabarkan secara konsep saja, tetapi juga dihitung dengan angka-angka sehingga memungkinkan hasil akurat.

Adapun skala pengukuran yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah skala pengukuran ordinal yaitu memberikan nilai antara skor untuk jawaban yang diperoleh dari daftar yang paling tinggi sampai yang paling rendah.

Sedangkan uji hipotesis yang dipakai adalah:

- a. Korelasi Rank Kendall, dengan maksud menguji apakah ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Penggunaan rumus ini untuk menguji hipotesis, apakah ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Rumus umum:

$$T = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - Tx\frac{1}{2}(N-1) - Ty}}$$

Dimana

$$Tx = \frac{1}{2}(t-1)$$

Tx = banyak observasi angka-angka sama dalam setiap kelompok angka sama pada variabel x

S = jumlah observasi skor-skor + 1 dan 2 untuk semua pasangan

N = banyak obyek atau individu yang diurutkan pada X dan Y

$$Ty = \frac{1}{2}(t-1)$$

Ty = banyaknya observasi berangka sama dalam setiap kelompok angka pada variabel Y

Untuk menguji tingkat signifikansi, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{T}{\frac{2(2N+5)}{\sqrt{9(N-1)}}$$

Kemudian harga Z dikonsultasikan dengan harga Z tabel dengan ketentuan:

- Jika Z hitung lebih besar daripada Zt pada taraf signifikansi 1 % berarti signifikan
- Jika Z lebih besar daripada Zt pada taraf signifikansi 5 % berarti signifikan
- Jika Z hitung lebih kecil pada taraf signifikansi 5 % berarti tidak signifikan

b. Koefisien Konkordansi Kendall, digunakan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan derajat asosiasi atau tingkat hubungan semua variabel bebas dengan variabel-variabel berikut.

Dengan rumus sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2}K^2(N - N) - K \sum T}$$

Keterangan :

W = Koefisien konkordansi kendall

S = Jumlah kuadrat dari deviasi mean Rj

N = Banyak obyek atau individu yang diberikan ranking

K = Banyaknya himpunan ranking penjenjangan

Jika terjadi nilai-nilai yang kembar rumusnya adalah:

T = Koefisien korelasi, digunakan apabila proposisi ranking

berangka sama itu menggunakan rumus sebagai berikut :

$$T = \frac{(t^2 - t)}{12}$$

Dimana :

t = Banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka-angka sama untuk suatu rangking.

Untuk menguji taraf signifikan, maka digunakan rumus:

$$X = K(N-1)W$$

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesa:

- Jika x hitung lebih besar daripada X maka hipotesa diterima
- Jika x hitung lebih kecil daripada X tabel maka hipotesa kerja ditolak

c. Koefisien Determinasi

Digunakan untuk mengetahui presentase besarnya perubahan variabel tergantung yang disebabkan oleh variabel bebas.

Rumus umum KD = (W) x 100 %.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. KEADAAN UMUM KUD SUBUR KECAMATAN GUNUNGPATI

Koperasi Unit Desa "Subur" berkedudukan di Desa Gunungpati Kota Semarang didirikan sesuai dengan akta pendirian tanggal 6 Oktober 1968 dengan Badan Hukum nomor : 7751/BH/VI tertanggal 17 September 1970 dan telah mengalami perubahan dua kali anggaran dasar yaitu pada tanggal 12 Februari 1970 dengan Badan Hukum Nomor :7751/BH/A dan pada tanggal 31 Oktober 1996 dengan Badan Hukum Nomor : 7751 b/BH/PAD/KWK-11/X/96 hingga sekarang.

Wilayah keanggotaan KUD Gunungpati mewiliputi 16 Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Gunungpati yaitu desa : Gunungpati, Plalangan, Nongkosawit, Cepoko, Jatirejo, Sukorejo, Kandri, Pongangan, Sadeng, Mangunsari, Sumurrejo, Pakintelan, Patemon, Ngijo, Kalisegoro, Sekaran.

Keanggotaan KUD pada tahun 1998 sebanyak 2.214 orang, tahun 1999 sebanyak 2.220 orang, tahun 2000 sebanyak 2.224 orang, tahun 2001 sebanyak 2.226 orang, tahun 2002 sebanyak 2.226 orang.

Susunan kepengurusan KUD sebagai berikut :

Pengurus

Ketua : Machdi
Sekretaris : Kasman
Bendahara : Abu Hasanudin

Manajemen

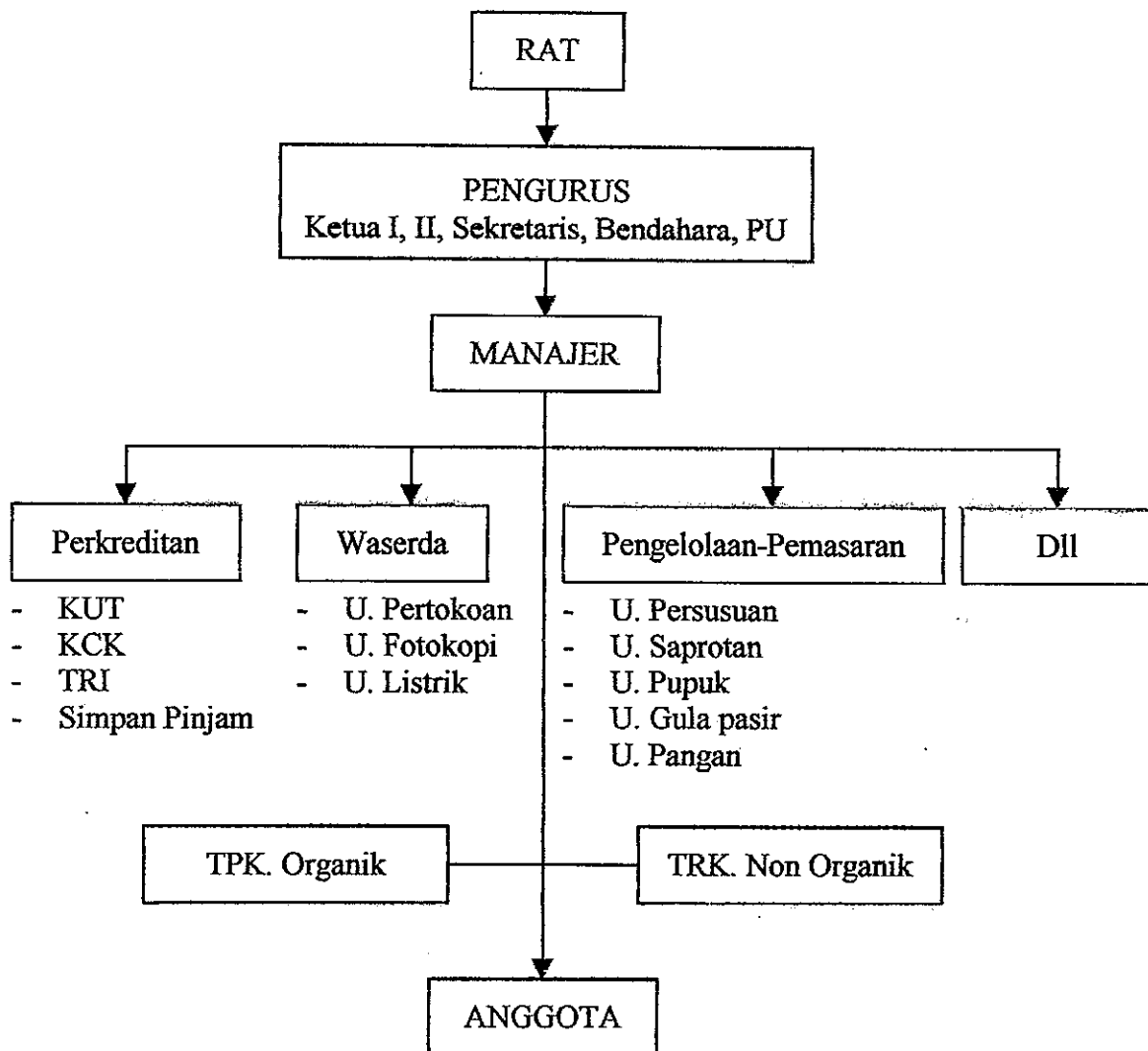
Manajer : Muhammad Sutrisno
Ka Kantor : Hardiyono
Kasir : Zurustini
Unit Listrik : Robingatun
U. Pertokoan dan SP. : Agusri
U. Persusuan dan kred.sapi : Suratman
Pembantu Umum : M. Suharto K
U. KUT, kebershn ling.kerja : M. Suharto K
U. KUT, kebershn ling.kerja : Yusup Wibisono
Sopir : Mugiyono

Bidang Usaha KUD meliputi :

- Unit Usaha Persusuan
- Unit Usaha Kelistrikan
- Unit Usaha Pertokoan
- Unit Usaha Simpan Pinjam
- Unit Usaha RMU
- Unit Usaha Wartel

GAMBAR IV.1

Struktur Organisasi KUD Subur Kecamatan Gunungpati sebagai berikut :



2. PERKEMBANGAN PROGRAM KUT DI KUD SUBUR GUNUNGPATI

KUD Subur Gunungpati sudah menyalurkan KUT pada Masa Tanam (MT) 1995/1996, MT 1998, MT 1998/1999 dan sudah selesai dalam pengembalian kredit sehingga tidak ada tunggakan. Pada MT 1999 periode I direalisasikan kredit sebesar Rp 321.121.850,00 dengan jumlah kredit yang sudah diangsur sebanyak Rp 194.684.051,00 dan terdapat tunggakan sebesar Rp 127.994.799,00 dengan luas lahan 281,95 Ha, jumlah petani 406 orang. Pada MT 1999 periode II direalisasikan kredit sebesar Rp 384.006.600,00 dengan jumlah kredit yang sudah diangsur sebanyak Rp 211.877.850,00 dan terdapat tunggakan sebesar Rp 172.128.750,00 dengan luas lahan 276,95 Ha, jumlah petani 378 orang.

B. HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban responden yang diperoleh atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner. Penyajian hasil penelitian ini dilakukan dalam bentuk tabel frekuensi pertanyaan dari masing-masing variabel.

B.1. Identitas Responden

Identitas responden meliputi klasifikasi responden berdasarkan umur dan tingkat pendidikan. Data mengenai identitas responden dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.1.

RESPONDEN MENURUT UMUR

NO	UMUR	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Di bawah 30 tahun	1	1,25
2	30-40 tahun	15	18,75
3	41-50 tahun	31	38,75
4	51- 60 tahun	26	32,50
5	Lebih dari 60 tahun	7	8,75
	Total	80	100,00 %

Sumber : Kuesioner, Data Umum

Dari Tabel IV.1 di atas diketahui bahwa petani penerima KUT pada KUD Subur Kecamatan Gunungpati yang terbanyak adalah kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 38,75 % kemudian diikuti kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 32,50 %, kelompok umur 30-40 tahun sebanyak 18,75, kelompok umur di atas 60 tahun sebanyak 8,75 % serta yang paling sedikit adalah kelompok umur di bawah 30 tahun sebanyak 1,25. Hal ini dikarenakan pada usia muda mulai timbul keengganan beratapencarian sebagai petani. Terlihat pada usia yang tergolong muda dibawah umur 40 tahun hanya sebanyak 20 % dari keseluruhan responden. Penduduk usia muda lebih memilih pekerjaan di luar pertanian atau bekerja di luar daerah.

Tabel IV.2.

RESPONDEN MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

NO	UMUR	FREKUENSI	PROSENTASE
1	SD	56	70
2	SLTP	19	23,75
3	SLTA	5	6,25
4	PERGR. TINGGI	0	0
	Total	80	100,00 %

Sumber : Kuesioner, Data Umum

Dari tabel IV.2 di atas diketahui bahwa petani penerima KUT pada KUD Subur Kecamatan Gunungpati yang terbanyak adalah berpendidikan SD sebanyak 70% kemudian diikuti berpendidikan SLTP sebanyak 23,75 %, SLTA sebanyak 6,25 %, responden yang berpendidikan perguruan tinggi tidak ada. Mayoritas petani penerima KUT berpendidikan sangat rendah menyebabkan taraf berfikir petani masih rendah dalam memandang sistem pengelolaan KUT. Pola pikir petani dalam memandang pelaksanaan KUT sangat simpel dan sederhana sehingga mempunyai kecenderungan hanya menerima belaka apapun yang diputuskan dalam pelaksanaan KUT. Mereka mempunyai banyak keluhan dan gagasan terutama berkenaan dengan pola pelaksanaan KUT yang ingin disampaikan tetapi tidak mampu dalam mendefinisikan masalah.

C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

C.1. Normalitas

Salah satu syarat yang penting dalam penelitian adalah dengan menguji normalitas data. Dengan melihat karakteristik masing-masing variabel maka akan dapat memberikan gambaran tentang teknik analisis data dengan analisis data non parametrik. Hasil uji normalitas menyimpulkan bahwa karakteristik data normal. Hasil perhitungan uji normalitas dapat terlihat dalam lampiran 4.

C.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil perhitungan uji validitas menunjukkan bahwa instrumen yang diuji telah memenuhi syarat uji. Hal ini terlihat dari kaidah pengambilan keputusan uji korelasi :

- Jika nilai signifikansi (P Value) $>0,05$ maka tidak terjadi hubungan yang signifikan.
- Jika nilai signifikansi (P Value) $< 0,05$ maka terjadi hubungan yang signifikan.

Uji Validitas (Correlation) di atas dapat terlihat bahwa hubungan masing-masing item pertanyaan dengan total variabel keseluruhannya signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan untuk variabel implementasi, sikap, komunikasi dan partisipasi berstatus valid. Hasil perhitungan uji validitas dapat dilihat dalam lampiran 5.

Sedangkan Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa item pertanyaan dari masing-masing variabel berstatus reliabel. Hal ini terlihat dalam kaidah pengambilan keputusan :

- Jika angka reliabilitas Alpha melebihi angka 0,6 maka item pertanyaan variabel tersebut berstatus reliabel
- Jika angka reliabilitas Alpha kurang dari angka 0,6 maka item pertanyaan variabel berstatus tidak reliabel.

Berdasarkan uji Reliabilitas diperoleh nilai Alpha 0,7368 untuk variabel implementasi, 0,8259 untuk variabel sikap, 0,8332 untuk variabel komunikasi, 0,7803 yang kesemuanya di atas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan untuk masing-masing variabel berstatus reliabel. Hasil perhitungan uji Reliabilitas dapat dilihat dalam lampiran 6.

C.3. Hubungan Sikap Petani dengan Implementasi Program KUT

TABEL IV.3

HUBUNGAN SIKAP DENGAN IMPLEMENTASI

Korelasi Nonparametrik

	Implementasi	Sikap
Tau Kendall tau_b Implementasi	1,000	0,596**
Koefisien korelasi Signifikan (2-simpul)	,	0,000
N	80	80
Sikap	0,596 **	1,000
Koefisien Korelasi Signifikant (2- simpul)	0,000	,
N	0,80	80

** Korelasi pada signifikansi level 0,01 (2-simpul)

Berdasarkan pada Tabel IV.3 menunjukkan adanya hubungan antara sikap petani dengan implementasi program KUT. Uji Korelasi Kendall Tau antara Implementasi dan sikap menghasilkan nilai koefisien kendall tau sebesar 0,596 dengan nilai P Value (signifikansi) sebesar 0,000. Karena nilai P Value tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Besarnya pengaruh variabel sikap petani terhadap implementasi program KUT sebesar $(0,596)^2=0,355$ atau 35,5 %.

TABEL IV.4
TABEL SILANG
PENGARUH SIKAP TERHADAP IMPLEMENTASI

Sikap	Implementasi				Total
	Kurang berhasil	Cukup Berhasil	berhasil	Sangat berhasil	
Kurang Baik	13 86,67 % 32,50 % 16,25 %	2 10,00 % 7,69 % 2,50	- - - -	- - - -	15 100 % 18,75 % 18,75 %
Cukup Baik	23 69,70 % 57,50 % 28,75 %	2 27,27 % 34,62 % 11,25 %	1 3,03 % 7,69 % 1,25 %	- - - -	33 100 % 41,25 % 41,25 %
Baik	2 33,33 % 5,00 % 2,50 %	3 50,00 % 11,54 % 3,75 %	1 16,67 % 7,69 % 1,25 %	- - - -	6 100 % 7,50 % 7,50 %
Sangat Baik	2 7,09 % 5,00 % 2,50 %	12 46,12 % 46,12 % 15,00 %	11 42,31 % 84,62 % 13,75 %	1 3,85 % 100 % 1,25 %	26 100 % 32,50 % 32,50 %
Total	40 50,00 % 100,00 % 50,00	26 32,50 % 100,00 % 32,50 %	13 16,25 % 100 % 16,25 %	1 1,25 % 100,00 % 1,25 %	80 100 % 100 % 100 %

Sumber : Data primer

Berdasarkan Tabel IV.4, Hubungan antara variabel sikap petani dengan implementasi program KUT menunjukkan 86,67 % responden yang mempunyai sikap yang kurang baik terhadap program KUT memiliki kategori implementasi program KUT yang kurang berhasil dan 32,50 % responden yang masuk kategori kurang berhasilnya implementasi memiliki sikap yang kurang baik. Sedangkan 3,85 % responden yang memiliki sikap sangat baik masuk dalam kategori implementasi yang sangat berhasil dan 100 % responden yang masuk kategori implementasi program KUT yang sangat berhasil memiliki sikap yang sangat baik. Adanya nilai ekstrim terlihat dari 7,69 % responden yang mempunyai sikap sangat baik termasuk dalam kategori implementasi yang kurang berhasil dan 5,00 % responden dalam kategori implementasinya kurang berhasil mempunyai sikap yang sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena adanya keterlambatan pengembalian kredit akibat gagal panen yang parah, Hasil ini telah memperlihatkan bahwa sikap petani mempunyai hubungan dengan implementasi program KUT.

C.4. Hubungan Komunikasi dengan implementasi program KUT

TABEL IV.5

HUBUNGAN KOMUNIKASI DENGAN IMPLEMENTASI

Korelasi Nonparametrik

		Implementasi	Sikap
Tau Kendall tau_b Implementasi	Koefisien Korelasi	1,000	0,430**
	Signifikan (2-simpul)	,	0,000
	N	80	80
Sikap	Koefisien Korelasi	0,430 **	1,000
	Signifikan (2- simpul)	0,000	,
	N	0,80	80

** Korelasi pada signifikansi level 0,01 (2-simpul)

Berdasarkan pada Tabel IV.5 menunjukkan adanya hubungan antara komunikasi dengan implementasi program KUT. Uji Korelasi Kendall Tau antara Implementasi dan komunikasi menghasilkan nilai koefisien kendall tau sebesar 0,430 dengan nilai P Value (signifikansi) sebesar 0,000. Karena nilai P Value tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Besarnya pengaruh variabel komunikasi terhadap implementasi program KUT sebesar $(0,430)^2=0,1849$ atau 18,49 %.

TABEL IV.6**TABEL SILANG****PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP IMPLEMENTASI**

Komunikasi	Implementasi				Total
	Kurang berhasil	Cukup Berhasil	berhasil	Sangat berhasil	
Kurang Baik	18	2	-	-	20
	90,00 %	10,00 %	-	-	100 %
	45,00 %	7,69 %	-	-	25,00 %
	22,50 %	2,50	-	-	25,00 %
Cukup Baik	4	7	1	-	12
	33,33 %	58,33 %	8,33 %	-	100 %
	10,00 %	26,92 %	7,69 %	-	15,00 %
	5,00 %	8,75 %	1,25 %	-	15,00 %
Baik	13	14	3	1	31
	41,94 %	45,16 %	9,68 %	3,23 %	100 %
	32,50 %	53,85 %	23,08 %	100 %	38,75 %
	16,25 %	17,50 %	3,75 %	1,25 %	38,75 %
Sangat Baik	5	3	9	-	17
	29,41 %	17,65 %	52,94 %	-	100,00
	12,50 %	11,54 %	69,25 %	-	21,25 %
	6,25 %	3,75 %	11,25 %	-	21,25 %
Total	40	26	13	1	80
	50,00 %	32,50 %	16,25 %	1,25 %	100 %
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %
	50,00	32,50 %	16,25 %	1,25 %	100 %

Sumber : Data primer

Berdasar Tabel IV.6, Hubungan antara variabel komunikasi dengan implementasi program KUT menunjukkan 90,00 % responden yang mempunyai komunikasi yang kurang baik memiliki kategori implementasi program KUT yang kurang berhasil dan 45,00 % responden yang masuk kategori kurang berhasilnya implementasi memiliki komunikasi yang kurang baik. Sedangkan 52,94 % responden yang memiliki komunikasi sangat baik masuk dalam kategori implelementasi yang berhasil dan 69,23 % responden yang masuk kategori implementasi program KUT yang berhasil memiliki komunikasi yang sangat baik. Adanya nilai ekstrim terlihat dari

29,41 % responden yang mempunyai komunikasi sangat baik termasuk dalam kategori implementasi yang kurang berhasil dan 12,50 % responden dalam kategori implementasinya kurang berhasil mempunyai komunikasi yang sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena adanya keterlambatan penyaluran kredit sehingga penggunaan kredit tidak sesuai dengan waktu dan kebutuhan pengelolaan pertanian. Hasil ini telah memperlihatkan bahwa komunikasi mempunyai hubungan dengan implementasi program KUT.

C.4. Hubungan Partisipasi dengan implementasi program KUT

TABEL IV.7

HUBUNGAN PARTISIPASI DENGAN IMPLEMENTASI

Korelasi Nonparametrik

	Implementasi	Sikap
Tau Kendall tau_b Implementasi	1,000	0,287**
Koefisien Korelasi Signifikan (2-simpul)	,	0,000
N	80	80
Sikap	0,287**	1,000
Koefisien Korelasi Signifikant (2- simpul)	0,000	,
N	0,80	80

** Korelasi pada signifikansi level 0,01 (2-simpul)

Berdasarkan pada Tabel IV.7 menunjukkan adanya hubungan antara partisipasi dengan implementasi program KUT. Uji Korelasi Kendall Tau anta Implementasi dan partisipasi menghasilkan nilai koefisien kendall tau sebesar 0,287 dengan nilai P Value (signifikansi) sebesar 0,000. Karena nilai P Value tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Besarnya pengaruh variabel komunikasi terhadap implementasi programKUT sebesar $(0,287)^2=0,08236$ atau 8,24 %.

TABEL IV.8
TABEL SILANG
Pengaruh Partisipasi terhadap Implementasi

Partisipasi	Implementasi				Total
	Kurang berhasil	Cukup Berhasil	berhasil	Sangat berhasil	
Kurang Tinggi	10	5	1	-	15
	58,82 %	29,41 %	5,88 %	-	100 %
	25,00 %	19,23 %	7,69 %	-	18,75 %
	12,50 %	6,25 %	1,25 %	-	18,75 %
Cukup Tinggi	23	12	1	-	33
	63,89 %	33,33 %	2,78 %	-	100 %
	57,50 %	46,15 %	7,69 %	-	41,25 %
	28,75 %	15,00 %	1,25 %	-	41,25 %
Tinggi	6	9	4	-	6
	31,58 %	47,37 %	21,05 %	21,05 %	100 %
	15,00 %	34,62 %	30,77 %	30,77 %	7,50 %
	7,50 %	11,25 %	5,00 %	5,00 %	7,50 %
Sangat Tinggi	1	-	7	7	25
	12,50 %	-	87,50 %	87,50 %	100,00
	2,50 %	-	53,85 %	53,85 %	32,50 %
	1,50 %	-	8,75 %	8,75 %	32,50 %
Total	40	26	13	1	80
	50,00 %	32,50 %	16,25 %	1,25 %	100 %
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %
	50,00 %	32,50 %	16,25 %	1,25 %	100 %

Sumber : Data primer

Berdasarkan Tabel IV.8, Hubungan antara variabel partisipasi petani dengan implementasi program KUT menunjukkan 58,82 % responden yang mempunyai partisipasi yang kurang tinggi (rendah) terhadap program KUT memiliki kategori implementasi program KUT yang kurang berhasil dan 25,00 % responden yang masuk kategori kurang berhasilnya implementasi memiliki partisipasi yang kurang tinggi (rendah). Sedangkan 87,50 % responden yang memiliki partisipasi sangat tinggi masuk dalam kategori implementasi yang berhasil dan 53,85 % responden yang masuk kategori implementasi program KUT yang berhasil memiliki partisipasi yang sangat tinggi.

Adanya nilai ekstrim terlihat dari 12,50 % responden yang mempunyai partisipasi sangat tinggi termasuk dalam kategori implementasi yang kurang berhasil dan 2,50 % responden dalam kategori implementasinya kurang berhasil mempunyai partisipasi yang sangat tinggi. Hal ini dimungkinkan karena adanya keterlambatan penyaluran kredit sehingga penggunaan kredit tidak sesuai dengan waktu dan kebutuhan pengelolaan pertanian. Dan terdapat 5,88 % responden dengan tingkat partisipasi yang kurang tinggi termasuk dalam kategori implementasi yang berhasil. Hal ini dimungkinkan adanya beberapa kelompok tani yang mempunyai manajemen kelompok yang baik dalam pendistribusian dan penggunaan kredit bagi anggotanya secara tepat. Hasil ini telah memperlihatkan bahwa partisipasi petani mempunyai hubungan dengan implementasi program KUT.

C.5. Hubungan Sikap, Komunikasi dan Partisipasi dengan Implementasi Program KUT

Penjelasan mengenai keterkaitan variabel sikap (X1), komunikasi (x3) dengan implementasi program KUT (Y) disajikan dalam Tabel IV.9 berikut :

Dari Tabel IV.9 dapat dilihat bahwa petani yang sikapnya sangat baik, komunikasinya sangat baik dan partisipasinya sangat tinggi dan implementasinya berhasil sebanyak 1 responden (1,25 % dari keseluruhan responden). Kondisi ini merupakan kondisi yang paling optimum atau kondisi yang paling baik.

Petani yang partisipasinya kurang tinggi, komunikasinya kurang baik sikapnya kurang baik dan implementasinya kurang berhasil sebanyak 5 responden (6,25 % dari keseluruhan responden). Kondisi ini merupakan kondisi yang paling minimum atau kondisi yang paling buruk. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan petani sangat rendah, ketidakpahaman prosedural KUT, ketidaktepatan mekanisme penyaluran dan pengembalian kredit serta adanya kegagalan panen.

Petani yang partisipasinya kurang tinggi, komunikasinya kurang baik dan sikapnya cukup baik dan implementasinya kurang berhasil sebanyak 2 responden (2,5 % dari keseluruhan responden).

Ketidakkonsistenan yang paling ekstrim terjadi pada 1 responden (1,25 % dari keseluruhan responden) yang mana partisipasinya sangat tinggi, komunikasinya baik, sikapnya baik, tetapi implementasinya kurang berhasil. Ketidakkonsistenan ini disebabkan oleh faktor keterlambatan penyaluran kredit hingga berbulan-bulan sehingga kredit tidak sinergis dengan kebutuhan petani dan masa tanam sehingga bagi petani yang mengandalkan modal dari KUT mengalami ketidaksesuaian masa tanam, ditambah dengan apabila terjadi kegagalan panen yang disebabkan oleh cuaca ataupun wabah dan hama.

Ketidakkonsistenan lain terjadi pada 4 responden (4 % dari z responden) yang mana partisipasinya tinggi, komunikasinya sangat tinggi dan sikapnya cukup baik sedangkan implementasinya kurang baik. Penyebab Ketidak konsistenan ini tidak jauh beda dengan kondisi di atas.

Berdasarkan data tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdapat saling keterkaitan antara sikap, partisipasi, komunikasi dan implementasi. Sehingga ada kecenderungan bahwa variabel sikap, komunikasi dan partisipasi berpengaruh terhadap implementasi program KUT.

TABEL IV.10
HUBUNGAN SIKAP, KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI
DENGAN IMPLEMENTASI

Ranks	
	Mean Rank
Implementasi	4,00
Sikap	2,65
Komunikasi	1,00
Partisipasi	2,35

Tes Statistik	
N	80
Kendall's W	0,918
Chi-Square	220,364
Df	3
Asymp. Sig	0,000

a. Koefisien konkordasi kendall

Berdasarkan pada Tabel IV.10 menunjukkan adanya hubungan antara sikap, komunikasi dan partisipasi petani dengan implementasi program KUT. Uji Korelasi Kendall Tau antara sikap, komunikasi dan

partisipasi dengan implementasi menghasilkan nilai konkordasi kendall sebesar 0,918 serta nilai Chi square sebesar 220,364 dengan nilai P Value (signifikansi) sebesar 0,000. Karena nilai P Value tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel sikap, komunikasi dan partisipasi dengan implementasi. Besarnya pengaruh variabel sikap, komunikasi dan partisipasi petani terhadap terhadap implementasi program KUT sebesar $(0,918)^2=0,8427$ atau 84,27 %.

D. DISKUSI

Secara teoritis yang dibangun oleh para pakar mengemukakan bahwa sikap, komunikasi dan partisipasi adalah merupakan faktor yang menentukan implementasi.

Ternyata memang benar bahwa ketiga variabel tersebut merupakan bagian terbesar (84,27 %) dalam mempengaruhi implementasi program KUT pada KUD Subur Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Namun demikian perlu digali variabel-variabel lain yang juga menentukan implementasi program KUT. Faktor-faktor lain yang menentukan implementasi program KUT di luar variabel penelitian adalah sebesar 15,73 % dimungkinkan oleh faktor manajemen KUT, organisasi penyelenggara, budaya birokrasi, kapabilitas aparat, kepastian hukum dan sebagainya. Sehingga untuk menciptakan implementasi program KUT yang berhasil masih perlu dikaji secara mendalam terhadap faktor-faktor lain yang berada di luar variabel penelitian.

Untuk mewujudkan implementasi program KUT yang berhasil, maka instansi penyelenggara KUT perlu mengambil langkah-langkah strategis pembangunan ekonomi kerakyatan dan paradigma kebijakan publik. Ekonomi kerakyatan merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi secara meluas dengan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan berkeadilan sosial. Dikarenakan petani adalah mayoritas penduduk Indonesia maka sudah sewajarnya basis ekonomi kerakyatan dimulai dari pemberdayaan petani, diantaranya pemberian modal kerja seperti KUT. Dalam pemberdayaan petani perlu melibatkan tiga komponen penting yaitu peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat itu sendiri.

Sedangkan paradigma kebijakan publik menekankan kebijakan pemerintah harus mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Sehingga kebijakan atau program dari pemerintah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, kondisi dan karakteristik masyarakat luas maupun lingkungannya. Kebijakan program KUT hendaknya merupakan pencerminan dari kebutuhan petani yang harus disesuaikan dengan situasi kondisi petani dan karakteristik lahan pertanian. Kebijakan program KUT harus bisa dirasakan manfaatnya oleh petani sebagai wujud upaya pemberdayaan petani.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari analisis serta pengujian data terhadap hipotesis yang diajukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya hubungan antara sikap petani terhadap implementasi program KUT. Besarnya pengaruh sikap petani terhadap implementasi program KUT sebesar 35,5 %.
2. Adanya hubungan antara komunikasi terhadap implementasi program KUT. Besarnya pengaruh komunikasi terhadap implementasi program KUT sebesar 18,49 %.
3. Adanya hubungan antara partisipasi petani terhadap implementasi program KUT. Besarnya pengaruh partisipasi petani terhadap implementasi program KUT sebesar 8,24 %.
4. Adanya hubungan antara sikap, komunikasi dan partisipasi petani terhadap implementasi program KUT. Besarnya pengaruh sikap, komunikasi dan partisipasi petani terhadap implementasi program KUT sebesar 84,27 %.
5. Mayoritas petani penerima KUT berlatar belakang pendidikan rendah yaitu SD sebanyak 70 % sedangkan sisanya SLTP sebanyak 23,75 % dan SLTA hanya 6,25 %. Pendidikan yang rendah menyebabkan taraf berfikir dan pola pikir petani sangat sederhana sehingga petani mempunyai kecenderungan sikap hanya sekedar menerima apapun pola KUT, proses komunikasi mempunyai kecenderungan satu arah dari petugas kepada petani serta partisipasi petani juga sekedar mengikuti aturan main KUT.

6. Mayoritas petani penerima KUT memiliki umur yang mendekati kelompok umur tua 51 tahun ke atas sebesar 41,25 %, 41-50 tahun sebesar 38,75 %, dibawah umur 40 tahun hanya 20 %. Terlihat komposisi umur muda mempunyai kecenderungan bekerja di luar pertanian atau bekerja di luar daerah.
7. Variabel Implementasi memiliki kriteria penilaian 50 % kurang berhasil, 32,5 % cukup berhasil, 16,25 % berhasil dan 1,25 % sangat berhasil. Melihat prosentase tersebut Implementasi bisa dikategorikan belum sepenuhnya berhasil, hal ini dikarenakan masih seringnya keterlambatan dalam peyaluran KUT, pengawasan aparat dalam penyaluran yang masih lemah, keterlambatan pengembalian kredit, dampak positif dari KUT yang rendah (pendapatan petani rendah, prospek pasar panen, jumlah tenaga kerja, sarana produksi pertanian minim).
8. Variabel sikap memiliki kriteria penilaian 18,75 % kurang baik, 41,25 % cukup baik, 7,50 % baik dan 32,50 % sangat baik. Melihat prosentase tersebut sikap bisa dikategorikan cukup baik. Hal ini dikarenakan sikap menerima, mendukung, minat dan rasa senang petani terhadap program KUT.
9. Variabel komunikasi memiliki kriteria penilaian 25 % kurang baik, 15 % cukup berhasil, 38,75 % baik dan 21,25 % sangat baik. Melihat prosentase tersebut komunikasi bisa dikategorikan baik, hal ini dikarenakan proses komunikasi yang dilakukan oleh petugas kepada petani cukup baik dan sosialisasi informasi KUT kepada petani juga baik.

10. Variabel partisipasi memiliki kriteria penilaian 21,25 % kurang tinggi, 45,00 % cukup tinggi, 16,25 % tinggi dan 1,25 % sangat tinggi. Melihat prosentase tersebut Implementasi bisa dikategorikan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan tingginya kehadiran petani dalam pertemuan KUT, kesediaan petani dalam mengelola kredit secara baik, kesediaan iuran kelompok untuk keperluan KUT, keaktifan petani turut mengawasi KUT, Rasa tanggungjawab yang besar terhadap KUT.
11. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya tunggakan yang cukup banyak oleh petani adalah karena gagal panen, biaya tinggi dalam pengelolaan pertanian karena krisis ekonomi, mekanisme KUT yang terlalu birokratis, dan lama, keterlambatan dalam menerima kredit serta pola musim tanam yang kaku.

B. Rekomendasi

Agar implementasi program KUT di Kecamatan Gungpati bisa berhasil maka harus diadakan perbaikan dalam berbagai faktor terkait yaitu :

1. Mengingat variabel implementasi mempunyai kriteria kurang berhasil sebanyak 40 responde (50 %) maka perlu diadakan pembenahan terutama pada pola pengajuan, penyaluran dan pengembalian kredit diusahakan lebih dirasionalisasi dan dirampingkan. Misal memangkas birokrasi dalam pengajuan kredit dan penyalurannya tidak perlu menggunakan mediator kredit seperti koperasi atau LSM tetapi langsung dari kelompok tani kepada Bank pelaksana, dengan diawasi oleh PPL, dengan petani dan kelompok tani bertanggungjawab penuh terhadap pengembalian kredit.

Pola pengajuan dan penyaluran jangan menggunakan musim tanam yang kaku tetapi pengajuan dan penyaluran kredit bersifat lebih fleksibel sesuai kebutuhan petani waktu yang tepat menurut petani. Diharapkan dengan pola ini permasalahan keterlambatan pencairan kredit bisa di atasi, petani lebih memiliki rasa tanggungjawab yang besar dalam pelunasan kredit serta pola implementasi KUT lebih mencerminkan kebutuhan dari petani.

2. Jatuh tempo pembayaran kredit hendaknya diperpanjang lebih dari satu tahun serta bunga sebesar 10,5 % hendaknya perlu diturunkan dan pembayarannya bertahap. Hal ini dengan pertimbangan waktu satu tahun belum tentu cukup untuk masa pembibitan, tanam, pemeliharaan, panen serta masa penjualan. Sedangkan bunga sebesar 10,5 % pertahun dirasakan cukup berat dikarenakan biaya produksi mengalami peningkatan drastis dikarenakan krisis ekonomi.
3. Perlu adanya solusi yang terbaik untuk menangani tunggakan. Kejelasan dan kepastian hukum sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah KUT, terutama berkaitan dengan tunggakan yang banyak. Kejelasan hukum juga menyangkut kejelasan dari Juklak KUT dan pelaksanaannya oleh penyelenggara KUT.
4. Perlu adanya penanganan pasca panen terutama menampung hasil panen, distribusi pasar dan standarisasi harga hasil panen. Hal ini penting dikarenakan pada saat panen raya harga panen jatuh dikarenakan tidak ada lembaga formal yang menangani pasca panen.

5. Perlu adanya pengawasan dari semua pihak terhadap pelaksanaan KUT baik dari akademisi, masyarakat maupun sektor swasta dengan maksud meminimalisir penyalahgunaan dana KUT oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
6. Hendaknya ada suatu forum evaluasi keberhasilan implementasi KUT yang melibatkan berbagai unsur dari petani, penyelenggara KUT (Kankop, koperasi, Bank pelaksana, PPL, Bimas), akademisi serta tokoh masyarakat sehingga bisa diketahui sejauhmana tingkat keberhasilan implementasi KUT serta dicarikan pola KUT yang tepat dan sesuai dengan karakteristik lahan pertanian serta merupakan cerminan kebutuhan petani secara riil.
7. Perlu digali penelitian diluar variabel penelitian ini, dikarenakan dimungkinkan masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi terutama faktor manajemen KUT, organisasi penyelenggara KUT, budaya birokrasi, kapabilitas aparat, kepastian hukum dan kejelasan aturan.
8. Perlu dilakukan pembagian Juklak-juknis KUT kepada seluruh kelompok tani dikarenakan petani sebenarnya harus mengetahui bagaimana konsep dan pelaksanaan KUT secara komprehensif. Dengan ini diharapkan petani mengetahui tugas, hak dan kewajiban sebagai penerima KUT. Petani juga mengetahui tugas dan wewenang penyelenggara KUT (Kankop, koperasi, Bank pelaksana, PPL, Bimas). Petani juga bisa mengetahui sistem pengelolaan KUT secara keseluruhan sehingga petani juga mampu mengontrol dirinya dan penyelenggara KUT dalam melaksanakan program KUT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin, **Pengantar Analisis Kebijakan Negara**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Azwar, Syarifudin, **Aspek-aspek Psikologis dan Organisasi**, Erlangga, Jakarta, 1988.
- Bryan-White, **Manajemen Pembangunan**, LP3S, Jakarta, 19889, (dalam alih bahasa).
- Dunn, William N, **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, Gajahmada University Press, Edisi Kedua, Yogyakarta, 1998(dalam alih bahasa).
- Effendi, Onong U, **Psikologi Manajemen dan Organisasi**, Mandar Maju, Bandung, 1983.
- Gerungan, **Psikologi Sosial**, Eresco, Bandung, 1996.
- Indarawijaya, Adam, **Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar**, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Indarawijaya, Adam, **Perilaku Organisasi**, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Islamy, Irfan, **Prinsi-preinsip Perumusan Kebijakan Negara**, Bina Aksara, Jakarta, 1992.
- Kerlinger, Fred and Pedhasur, Elazar, **Korelasi dan Analisis Regresi Ganda**, Nur Cahaya, Jakarrta, 1987 (dalam alih bahasa).
- Korten, David, Syahrir, **Pembangunan Berdimensi Kerakyatan**, Yayasan Obor, Indonesia, 1988.
- Liang Gie, The, **Administrasi Perkantoran Modern**, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1984.
- Mar at, **Sikap Manusia Perubahan dan Pengukuran**, Bandung, 1981.
- Moeljarto, **Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi**, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993.

Ndhar, Taldzuhuh, Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Dian Aksara, Jakarta, 1987.

Samsi, Ibnu, Ensiklopedi Umum dan Pembangunan Seri I, UGM, Yogyakarta, 1988.

Sastropetro, Santoso, Komunikasi Sosial, Sinar Baru, Bandung 1987.

Singarimbun, Masri, dan Efendi, Sofyan, Metode Penelitian Survey, LP3S, Jakarta, 1981.

Thoha, Miftah, Aspek-aspek Pokok Ilmu Administrasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1983.

Wirardi, Azaz-azaz Manajemen, Alumni, Bandung, 1981.

Non Buku :

Edward III, George, Implementing Public Policy, Congressional Quartelly Press, Washington DC, 1980 disunting oleh Hartuti Purnaweni, Kitat MK Kebijakan Publik, 1991.

Juklak Juknis KUT tahun 1998.

Juklak Juknis KUT tahun 1999.

Suwitri, Sri, Diktat Kuliah Implementasi Kebijakan Publik, FISIP UNDIP, 1993.

Santiko, Ayo, Keberhasilan Implementasi Program Kredit Usaha Tani (Studi Komparasi di Kecamatan Bayumanik dan Kecamatan Gunungpati), 2000.